

**SISTEM JUAL BELI GENTING ANTARA PRODUSEN DENGAN AGEN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

OLEH:

DINA LESTARI

NPM . 1621030387

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**SISTEM JUAL BELI GENTING ANTARA PRODUSEN DENGAN AGEN
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan
Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

OLEH:

DINA LESTARI

NPM 1621030387

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020**

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam berbagai hal baik sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan transaksi dengan individu lain dengan memanfaatkan harta yang dimiliki. Salah satu transaksi yang sering ditemukan adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat terutama masyarakat di Desa Sendang Asih. Salah satu jual beli yang dilakukan di Desa Sendang Asih yaitu jual beli genting. Pelaksanaan jual beli genting yang dilakukan di Desa Sendang Asih adalah kegiatan yang dilakukan antara produsen dan agen dimana agen akan datang langsung ke tolong untuk melihat genting dan melakukan kesepakatan pembelian dengan produsen. Kesepakatan tersebut terkait dengan harga dan kualitas genting yang ada di tolong. Adapun yang menjadi masalah dari judul ini adalah bagaimana sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tolong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah? dan Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tolong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tolong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tolong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang menjadi tempat penelitian dan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu memaparkan dan melaporkan suatu objek, keadaan, kebiasaan dan perilaku tertentu kemudian dianalisis secara kritis. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu produsen dan agen sebagai sumber data utama sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian ini dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli genting yang terjadi yaitu agen datang langsung ke tolong untuk melihat genting yang ada di tolong dan apabila setuju maka produsen dan agen akan melakukan kesepakatan secara lisan. Produsen menjual dengan harga yang disepakati, sedang biaya muat dan pengangkutan menjadi tanggung jawab agen (pembeli). Oleh karenanya, apabila terjadi kerusakan ketika sampai di tempat tujuan, bukan merupakan tanggung jawab produsen. Sesuai dengan akad bahwa genting yang pecah sampai di tempat tujuan merupakan tanggung jawab agen, maka secara hukum produsen tidak berkewajiban untuk mengganti dan apabila agen menuntut ganti rugi atas genting yang pecah kepada produsen maka hukumnya mubah (boleh), artinya produsen secara hukum tidak berkewajiban untuk mengganti.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA LESTARI

NPM : 1621030387

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Juli 2020

Penulis



Dina Lestari

1621030387



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Dina Lestari

NPM : 1621030387

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syaria'h

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Eti Karini S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. 35131 (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM JUAL BELI GENTING ANTARA PRODUSEN DENGAN AGEN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh Nama: **Dina Lestari NPM: 1621030387**
Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Dekan Fakultas Syariah
Raden Intan Lampung**



**H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki Nya. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 1)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan penulis kekuatan dan telah menuntun dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sukardi dan Mama Siti Marinah yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi dari bapak dan mama yang selalu menguatkan setiap langkahku meskipun banyak kesulitan yang dihadapi. Terima kasih kepada bapak dan mama semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin
2. Adikku tersayang Rendy Pratama yang selalu membuatku tertawa walaupun banyak kesulitan yang kuhadapi.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikku.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Dina Lestari dilahirkan di Sendang Asih-Lampung Tengah pada tanggal 28 September 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan bapak Sukardi dan Ibu Siti Marinah.

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sendang Agung, lulus pada tahun 2004
2. SDN 02 Sendang Asih, lulus pada tahun 2010
3. SMP M Sendang Agung, lulus pada tahun 2013
4. SMA M Pringsewu, lulus pada tahun 2016
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, lulus pada tahun 2020



Bandar Lampung, 2 Juli 2020

Penyusun,

Dina Lestari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kahadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nantinya. Skripsi ini berjudul Sistem Jual Beli Genteng Antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi di Tobong Genteng Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itu yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Warsito selaku kepala Desa Sendang Asih, beserta semua pihak yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan selama melakukan penelitian.
7. Teman serumah permata 01 yaitu kakak Eis, Nur, Mitha, Erma dan Ajeng yang selalu menyemangati.
8. Laki-laki yang bisa menjadi teman, sahabat sekaligus keluarga yang selalu menyemangati Aan.
9. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 dan yang terkhusus teman-teman Muamalah H.
10. Teman-teman KKN kelompok 247 desa Way harong, Dea Sasmita, Yuli Krisma, Linda Mariyani, Saras Salsabila, Umi Lupita Rani, Putri Sanggita Padmayani, Sherly Septiani, Saskia Hanum Pratiwi, Imadudin Majid, Rizky Ilmawan, Arif Suranto, Fadlan Ramadhan dan Lucky Lukman.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya

ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca

Bandar Lampung, 2 Juli 2020

Penyusun

Dina Lestari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Signifikasi Penelitian	5
H. Metode Penelitian	6

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli	10
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
3. Macam-macam Jual Beli	21
4. Akad Jual Beli dan Akibat Hukumnya	28
5. Khiyar dalam Jual Beli	35
6. Tanggung Jawab	46
B. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sendang Asih	52
B. Sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen di Desa Sendang Asih	60

BAB IV : ANALISA DATA

A. Sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah	67
---	----

B. Praktek Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen menurut Hukum Islam	70
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk	55
Tabel 2 Mata pencaharian penduduk	57
Tabel 3 Tingkat pendidikan masyarakat	58
Tabel 4 Keadaan agama penduduk	59



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pemerintahan Desa Sendang Asih	54
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul. Di samping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada Tobong Genteng Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Jual beli genteng antara produsen dengan agen mengandung arti menjual dan membeli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu.² Genteng adalah

¹ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: UB Perss, 2011), H.20

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.22

salah satu jenis atap rumah yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar³. Dalam hal ini, jual beli genting dilakukan antara produsen dan agen. Agen datang ke tobong dan melakukan kesepakatan dengan produsen terkait harga dan kualitas genting. kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul baik langsung maupun tidak langsung yang mengatur tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.⁴

Dari penjelasan penegasan judul tersebut maka maksud dari judul ini adalah membahas masalah Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah ;

1. Alasan Objektif,

- a. Karena agen merasa berkuasa dan produsen tidak membantah maka hal tersebut menimbulkan kerugian pada produsen itu sendiri, seperti yang terjadi di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
- b. Karena jenis transaksi ini sudah biasa terjadi dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik sebagai produsen maupun agen.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060.

⁴ Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini dipilih karena relevan dengan bidang ilmu yang sedang digeluti penulis di fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah.
- b. Berdasarkan aspek yang akan diteliti mengenai sistem jual beli tersebut serta tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat mungkin dilakukan penelitian

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya agar terjadi keselarasan. Aturan tersebut diatur oleh Islam dalam bentuk mu'amalah. Oleh karena itu mu'amalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁵ Orang banyak terjun ke dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya yaitu jual beli.⁶ Jual beli merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar.⁷

Sesuai dengan perkembangan zaman jual beli sangat berkembang dengan cepat dan bermacam-macam, salah satunya yaitu jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu jual beli genting. Genting adalah salah satu obyek yang banyak diminati oleh masyarakat karena genting merupakan benda yang berfungsi sebagai atap suatu bangunan. Genting merupakan

⁵ Nur Afifah, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2011), h.2

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.66

bagian utama dari suatu bangunan sebagai penutup atap rumah. Fungsi utama genting adalah untuk menahan panas cahaya matahari atau curahan air hujan.⁸

Berdasarkan penelitian sementara yang penulis laksanakan bahwa masyarakat di desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung tengah mayoritas masyarakatnya adalah pembuat genting. Dalam sistem jual beli genting, sudah disepakati bahwa perhitungan harga genting bersih di tempat produsen, tetapi ketika terjadi kerusakan di jalan Agen meminta ganti rugi genting yang pecah pada produsen dengan alasan genting kurang bagus, padahal pengangkutan genting dari tobong oleh agen ke tempat tujuan merupakan tanggung jawab agen, sedangkan genting yang pecah tidak dibawa ke tempat produsen oleh agen sebagai bukti. Untuk mengetahui apakah genting yang pecah merupakan tanggung jawab produsen atau agen, maka perlu dilakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem jual beli genting di tobong genting desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan judul penelitian sebagai berikut. **Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam (Studi pada Tobong Genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah Tentang Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam di tobong genting Desa

⁸ Wikan Wijayanti, *Membuat Genteng dan Batu Bata*, (Tangerang Selatan: Tirtamedia, 2013), h.2

Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Dengan mengetahui sistem jual belinya, maka secara hukum dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas genting yang pecah saat sampai di tujuan (tempat pengecer) akibat pengangkutan.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang sistem jual beli genting antara produsen dengan agen di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui bagaimana Menurut Hukum Islam tentang tanggung jawab genting yang pecah di tobong genting Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen Menurut Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya keilmuan Islam pada umumnya dan civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bagian bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti mengenai Sistem Jual Beli Genting antara Produsen dengan Agen

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.⁹ Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh adalah data baru dan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan dengan unsur yang ada. Di dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari Sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (produsen dan agen yang melakukan jual beli genteng di tolong genteng desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Dalam hal

⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.54.

ini data tersebut diperoleh dari responden langsung yaitu Produsen genting dan Agen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui pustaka (referensi) yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengumpulan Data

a. Interview/ wawancara

Interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi (orang yang di wawancarai) melalui komunikasi langsung.

Metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data berkenaan dengan permasalahan judul skripsi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar maupun foto.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi

dalam penelitian ini yaitu 10 Produsen dan 3 Agen. Karena jumlah populasinya sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Data yang telah terkumpul kemudian diuraikan secara kualitatif, yakni suatu metode yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang bisa dipahami.¹⁰ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif¹¹, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum mengenai sistem Jual Beli Genteng antara Produsen dengan Agen melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁰ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (yogyakarta : Andi, 2004), hlm. 41.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan menurut istilah *fiqh* yaitu adalah *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹²

Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantinya itu. Jalaluddin al-Mahally mengartikannya secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.¹³

Menurut istilah (terminologi) jual beli mengandung arti sebagai berikut:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu ke yang lain dengan dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'

¹²Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.155

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.63

- 3) Saling tukar menukar harta, saling menerima dan dapat dikelola melalui ijab dan kabul dengan cara yang sesuai dengan aturan syara'
- 4) Tukar-menukar barang yang satu dengan yang lain dengan cara yang diperbolehkan
- 5) Penukaran benda yang satu dengan yang lain melalui jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁴

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁵

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan melalui cara tertentu.¹⁶ Pertukaran harta yang dimaksud di sini yaitu adalah harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.68

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), h.10

¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish,2018),h.254

manusia untuk menggunakannya, serta cara tertentu yang dimaksud adalah dengan sighat atau ungkapan ijab dan kabul.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kenikmatan.¹⁷ Perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak dan yang menjadi objeknya adalah sesuatu yang berbentuk. Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.¹⁸ Penukaran tersebut bukan berupa emas dan bukan pula berupa perak dan barang tersebut sudah diketahui sifat-sifatnya.¹⁹

Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa jual beli lebih menekankan pada tukar-menukar harta dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Tukar-menukar yang dimaksud di sini adalah berupa pertukaran antara barang dengan uang. Jual beli yang terjadi pada zaman sekarang sangat berbeda dengan yang terjadi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia melakukan jual beli dengan cara saling menukar barang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dapat diartikan bahwa hikmah dari diperbolehkannya jual beli adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah.²⁰

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....,h.68

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
h.67

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,h.70

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana,2003), h.194

Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya adalah diperbolehkan (mubah)²¹ berdasarkan kitabullah dan sunnah yang berupa perkataan, sunnah yang berupa perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1) Dalil Al-qur'an

Manusia hidup di dunia memiliki kebutuhan bermacam-macam yang harus dipenuhi baik berupa sandang, pangan, papan dan lain lain. Salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dikenal oleh masyarakat dan sudah ada sejak zaman nabi kemudian berkembang hingga sekarang. Allah sudah mensyari'atkan jual beli sebagai kegiatan yang diperbolehkan hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.6

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan oleh syara' yang berarti bahwa hukumnya jelas boleh tetapi dilarang melakukan jual beli yang mengandung unsur riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun transaksi yang lain tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang tidak dibenarkan dalam syari'ah.²³ Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi Allah telah melarang manusia untuk melakukan riba karena sudah jelas dalam ayat di atas bahwa hukum dari riba adalah haram.

2) Hadis

Hadis yang mengemukakan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)²⁴

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah sesungguhnya Rasulullah bersabda: Jual beli hanya sah

²² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), h.83

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.151

²⁴ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), h.12

jika suka sama suka. (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah)²⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketergantungan hukum sah atau tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang menunjukkan suka sama suka seperti adanya ucapan dan penerimaan barang dalam jual beli.

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Tetapi bantuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain yang kita butuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Dengan jual beli yang benar dan sesuai syariat, kehidupan manusia akan berjalan dengan dinamis dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat penulis pahami bahwa jual beli itu diperbolehkan dan prinsip utama dalam jual beli adalah atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur riba sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam jual beli juga harus melalui jalan yang diperbolehkan menurut syara' dengan cara yang halal menurut peraturan-peraturan tentang aturan jual beli.

²⁵ Syamsul Rizal Hamid, *Hadis & Sunah Pilihan*, (Depok: Kaysa Media, Kaysa Media, 2017), h.130

²⁶ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h.26

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syaratnya. Transaksi jual beli membutuhkan rukun dan syarat sebagai penegaknya. Tanpa rukun dan syarat, jual beli akan menjadi tidak sah.²⁷ Rukun jual beli yang harus dipenuhi dan harus ada agar jual beli tersebut sah ada tiga macam, yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Orang yang berakad biasanya terdiri dari satu orang, beberapa orang dan bisa juga orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*).²⁸

Orang yang berakad diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna antara lain:

- a) Berakal maksudnya adalah agar dia tidak terkecoh, dan dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan hukumnya adalah tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, yang mengakibatkan pihak lain tersebut

²⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.7

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.52

melakukan perbuatan jual beli²⁹ bukan disebabkan kemauan sendiri melainkan ada unsur paksaan.

c) Keadaan tidak mubazir, maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d) Balig atau sudah dewasa.³⁰ Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun keatas atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), karena tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, yang belum *mumayyiz*, orang gila ataupun orang yang dipaksa.³¹ Tetapi, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan ,ana yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.³²

Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka akad jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h.141

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.41

³¹ Shalah ash-shawi dan abdullah al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq,2008), h.90

³² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,.....h.142

pembeli tanpa adanya paksaan karena jual beli yang mengandung paksaan tidak diperbolehkan dan harus ada unsur suka sama suka agar jual beli dapat dibuat.

2) Objek transaksi

Objek transaksi yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual. Objek akad dapat berupa barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Menurut Sayid Sabiq objek jual beli harus memenuhi syarat, yang meliputi:

- a) Barang tersebut harus suci dan halal karena tidak boleh menjual barang yang diharamkan atau najis seperti miras, daging babi dan bangkai . Barang yang mutanajis boleh diperjual belikan tetapi barang tersebut telah disucikan.³³
- b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia karena dalam Islam tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.³⁴
- c) Barang tersebut adalah milik yang melakukan akad jual beli karena dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri.

³³ Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam, Jurnal Islaminomic*, Vol.V No. 2, Agustus 2016, h.80 (On-line), tersedia di <http://jurnal.stesIslamicvillage.ac.id/>, (2 Juli 2020, 17:00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), h.280

- d) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung karena barang yang dijadikan objek dalam jual beli tidak boleh ada masa waktunya saat terjadinya akad.
- e) Barang tersebut diketahui bentuknya dan harganya sudah jelas artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukurannya agar tidak mengarah ke unsur yang mengandung penipuan.³⁵

Kelima syarat tersebut yang berkenaan dengan objek transaksi bersifat *kumulatif* dengan arti keseluruhannya harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Namun, apabila salah satu syarat belum terpenuhi tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama hukum sahnya.³⁶

3) Akad

Akad adalah perikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan, karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilaksanakan secara lisan namun jika tidak mungkin dilakukan dengan lisan maka bisa dilakukan dengan cara surat menyurat atau media lain yang mengandung arti ijab dan kabul agar akad tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.

³⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia.....*, h.90

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh.....*, h.199

Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Ada empat jenis bentuk akad, yaitu: akad dengan lisan (*'aqad bil lisan*) yang tidak asing lagi serta mayoritas masyarakat banyak yang menggunakannya, akad dengan tulisan (*'aqad bil kitabah*) yang biasanya dilakukan jika salah satu pihak dalam kondisi yang tidak memungkinkan melakukan akad secara lisan, akad dengan isyarat (*'aqad bil isyarah*) biasanya dilakukan oleh orang yang tuna wicara, dan akad dengan perbuatan (*'aqad bil al-Muathah*).³⁷ Bentuk akad tersebut digunakan oleh para pihak sesuai dengan situasi dan kondisinya karena hal yang terpenting dalam suatu sahnya suatu akad adalah penyampaian kehendak yang meliputi pengertian, kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat, yaitu:

a) Syarat umum

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu adalah kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh syara' serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, dapat memberikan faedah, ijab terus

³⁷ Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.68

berjalan hingga terjadinya kabul dan ijab dan kabul harus bersambung agar akad tidak menjadi batal.³⁸

b) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu yang meliputi: barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui seperti pada jual beli amanat, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan seperti dalam jual beli yang memakai ukuran timbangan, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.³⁹

Secara umum tujuan adanya rukun dan syarat adalah untuk menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad dan untuk menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad.

3. Macam-macam jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyyudin membagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang terlihat adalah pada saat melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan itu ada di depan penjual dan juga pembeli.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....,h.98

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.80

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan)
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak.⁴⁰

Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

- a. Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namun, jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan.⁴¹ Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan maksudnya adalah barang berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah ke kepemilikan menjadi milik penjual.
- b. Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.⁴²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa bagian yaitu:

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., h.75

⁴¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Prenadamedia Group, 2018), h.96

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,....., h.71

a. Jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal
- 2) Jual beli anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.
- 3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.

- 4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang⁴³ seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

- 5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.

- 6) Jual beli Malja' yaitu jual beli yng dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama

⁴³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gemilang, 2018), h.111

adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁴⁴

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:

- 1) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli⁴⁵ dan dipandang tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- 4) Jual beli sperma binatang yaitu jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik hukumnya adalah haram.
- 5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)
Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
- 6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

⁴⁴ *Ibid.*, h.112

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), H.247

Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.

- 7) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.⁴⁶ misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang
- 8) Jual beli Muhaqallah adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di kebun atau di sawah, maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- 9) Jual beli Mukhadharah yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen , misalnya rambutan yang masih hijau. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab barang tersebut masih samar dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuap angin sebelum dipanen oleh pembeli sehingga akan menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 10) Jual beli mulammasah adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain yang berarti bahwa

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*.....,h.169

seseorang itu dianggap membeli kain tersebut maka jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

- 11) Jual beli Munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar. Barang yang dilempar oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁷

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

- 1) Jual beli Mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul⁴⁸, maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
- 2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.
- 3) Jual beli Munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang,

⁴⁷ *Ibid.*, h.170

⁴⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,....., h.116

maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.

- 4) Jual beli Najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri)
- 5) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).
- 6) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.

- 7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁴⁹

4. Akad Jual Beli dan Akibat Hukumnya

a. Pengertian akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan.⁵⁰ Secara etimologi (bahasa), *'aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda
- 2) Sambungan (*aqdatun*), yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*Al-'Ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran 76).⁵¹

Secara istilah (terminologi) akad berarti: Perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Kehendak atau keinginan pihak pihak terikat itu sifatnya tersembunyi

⁴⁹ *Ibid.*, h.116

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.97

⁵¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, , h.42

dalam hati karena itu untuk mengungkapkan keinginan tersebut diungkap dengan suatu pernyataan yang disebut dengan ijab dan kabul

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Sedangkan makna akad secara umum yaitu adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak.⁵²

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan menurut pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yaitu kesepakatan yang ada dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵³

b. Rukun dan syarat akad

⁵² Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,....., h.10

Rukun-rukun akad menurut kalangan jumhur fuqaha adalah sebagai berikut:

1) '*aqid* yaitu orang yang melakukan akad

Pelaku akad yang dimaksud di sini adalah bisa berupa satu orang atau banyak orang. Subjek akad dapat berbentuk perorangan atau dan dapat juga dalam bentuk badan hukum.

Orang yang berakad disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal yang memiliki makna tidak gila sehingga mampu memahami ucapan yang dikatakan oleh orang lain. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* apabila mereka telah baligh. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁵⁴ Dan yang terpenting yaitu orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu memilih secara bebas yang dikehendaki.

2) *Ma'qud 'alaih* yaitu benda yang diakadkan

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* antara lain adalah:

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,, h.48

a) Barang yang *masyru'*

Barang yang dimaksud adalah barang yang menurut hukum Islam sah untuk dijadikan sebagai objek kontrak, yaitu barang yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

b) Bisa diserahterimakan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak agar tidak adanya penipuan, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

c) Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan timbul suatu perselisihan.

d) Objek akad harus ada pada saat akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan.⁵⁵ Barang yang dijadikan objek akad diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya serta ukurannya agar tidak mengarah pada unsur yang mengandung penipuan.⁵⁶

3) *Shighat al aqd* yaitu ijab dan kabul, ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran

⁵⁵ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*,.....,h. 38

⁵⁶ Shalah ash-shawi dan abdullah al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,.....,h.28

keinginannya untuk mengadakan akad, sedangkan kabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum tersebut antara lain: pihak-pihak yang melakukan akad adalah pihak yang dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*), objek akad diketahui oleh syara' yang harus memenuhi syarat-syarat di antaranya dimiliki oleh seseorang yang berbentuk harta serta bernilai menurut syara', akad tersebut tidak dilarang oleh nash syara', akad yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, akad tersebut bermanfaat dan ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul.

b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu: kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak atau ahli, objek akad dapat menerima hukumnya, akad

itu diizinkan oleh syara', bukan akad yang dilarang oleh syara',
ijab berjalan terus serta tidak dicabut sebelum terjadi kabul, ijab
dan kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab
sudah berpisah sebelum terjadinya kabul maka ijab tersebut
menjadi batal.⁵⁷

c. Akibat Hukum Akad

Menurut para ulama fiqh, setiap akad mempunyai akibat hukum
yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula,⁵⁸ seperti
pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat
mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali
disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada
objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu dari rukun dan
syarat akad.⁵⁹

Akibat hukum dalam Islam dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Akibat hukum pokok yang disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*)

Hukum akad yang dimaksud adalah terwujudnya tujuan akad yang
menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak.

- 2) Akibat hukum tambahan yang disebut hak-hak akad

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....,h.55

⁵⁸ Madmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNISNU PRESS,2019), h.5

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, , h.106

Akibat hukum tambahan maksudnya adalah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.⁶⁰

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sah tetapi, ada kemungkinan bahwa akibat hukum akad belum dapat dilaksanakan.⁶¹ Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah tersebut harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu:

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad

Kewenangan atas objek barang terpenuhi apabila mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.

2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum terhadap tindakan yang dilakukan.⁶²

Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud utama dari pelaksanaan akad dan akibat hukum yang hendak dicapai dengan adanya akad yaitu adalah pembeli memperoleh barang karena melakukan akad.

⁶⁰ Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.2 No.2, Juli 2010, h.6, (On-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (13 Maret 2020,08:42), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.101

⁶² *Ibid.* h.103

5. Khiyar dalam Jual Beli

a. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan.⁶³ Khiyar artinya boleh memilih antara dua pilihan yaitu meneruskan akad jual beli tersebut atau mengurungkan (tidak jadi melakukan jual beli). Diadakan khiyar oleh syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.⁶⁴

Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁵

Arti khiyar menurut ulama fiqh yaitu suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yyin.

Dengan demikian khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi. Khiyar berguna untuk menjaga

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,.....,h.97

⁶⁴ *Ibid.*, h.98

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,....., h.101

hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari.

Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁶

Dalam jual beli berlaku khiyar. Menurut agama Islam diperbolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Hak khiyar ditetapkan dalam syariat Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.⁶⁷

Khiyar dalam masalah jual beli disyariatkan dalam masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Jika penjual dan pembeli masih dalam satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai khiyar untuk melakukan jual beli atau membatalkannya
- 2) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan khiyar itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakati,

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....., h.129

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*.....,h.98

maka keduanya terikat dengan khiyar tersebut hingga waktunya habis.

- 3) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- 4) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia mengeluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai khiyar untuk membatalkan jual beli atau melangsungkannya.
- 5) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ridha ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai khiyar antara mengadakan jual beli atau membatalkannya.
- 6) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai khiyar antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.⁶⁸

b. Dasar Hukum Khiyar

- 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.113

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya.⁶⁹

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa di dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan syara' dan harus atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, maka berhati-hatilah dalam melakukan jual beli agar mendapatkan barang yang baik dan disukai, dan bersikap jujur serta menjelaskan keadaan barang yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan cacat yang terdapat dalam suatu barang yang dijadikan objek transaksi.

2) Hadis

Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling terpisah atau beliau bersabda hingga keduanya saling terpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta maka barakah jual beli itu akan dihapuskan. (HR. Bukhori).⁷⁰

3) Ijma'

Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau diperbolehkan karena dengan adanya khiyar masing-masing pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa tertipu atau karena

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, , h.7

⁷⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h.565

suatu keperluan yang sangat mendesak yang menyebabkan khiyar terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan suatu transaksi.

c. Macam-macam Khiyar

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Khiyar Syarat

a) Arti khiyar syarat

Khiyar syarat adalah hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.

Pengertian khiyar syarat menurut para ulama fiqh adalah Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Menurut Imam Hambali bahwa masa khiyar syarat dapat berlangsung sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Menurut ulama Maliki bahwa waktu khiyar syarat sangat ditentukan oleh kondisi barang yang dijual.⁷¹

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu

⁷¹ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: grafindo media pratama), h.31

akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta.

Syarat sah khiyar syarat menurut Dr, Yusuf al-Subaili, yaitu: Kedua belah pihak saling rela dan waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

Berakhirnya masa khiyar Para ulama berselisih pendapat, namun pada umumnya mereka sepakat yaitu ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati⁷² atau keduanya sepakat mengakhiri waktu khiyar sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.

2) Khiyar Majelis

a) Arti khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak pilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkan transaksi selama kedua belah pihak masih ada dalam satu tempat (majlis) dan belum berpisah badan.

Pengertian khiyar majlis menurut ulama fiqih adalah: Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.

⁷² Mujiatun Ridawati, *Konsep Khiyar dan Relevansinya dengan Garansi*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No.1, 2016, h.2 (On-line), tersedia di <http://ejournal.kopertais.or.id/>, (2 Juli 2020, 17:00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Apabila pihak penjual dan pembeli telah terpisah dari tempat akad tersebut berarti bahwa khiyar majlis tidak berlaku (batal). Namun, khiyar majlis tidak dapat berada di setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan upah-mengupah.

Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal yaitu kedua belah pihak memilih akan meneruskan akad tersebut dan di antara kedua belah pihak terpisah dari tempat jual beli tersebut.⁷³

b) Pandangan para ulama tentang khiyar majlis

Berkenaan dengan khiyar majlis, para ulama berpendapat bahwa khiyar majlis terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar, sebab Allah SWT. menyuruh untuk menepati janji, sedangkan khiyar menghilangkan keharusan tersebut.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sedangkan keridhaan hanya dapat

⁷³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.410

diketahui dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas khiyar majlis.

(2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majlis.⁷⁴ Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh dan tidak lazim selagi keduanya masih berada di satu tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun harga dan lain-lain.

3) Khiyar 'Aib

a) Arti khiyar 'aib

Khiyar 'aib yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai jual pada umumnya⁷⁵ atau mengurangi nilai barang tersebut.

Dasar hukumnya adalah hadis Nabi saw. : Seorang muslim adalah bersaudara dengan orang muslim lainnya, karena itu tidak

⁷⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,....., h.77

⁷⁵ Saleh al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),h.383

boleh seorang muslim menjual sesuatu yang mengandung cacat kepada muslim lainnya, kecuali ia menjelaskan adanya cacat tersebut. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni dari ‘Uqbah bin Amir).

Menurut ulama fiqh khiyar ‘aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.

Khiyar ‘aib dilakukan sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, artinya jika barang yang dijual itu terdapat cacat, maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut, sekalipun tidak disyaratkan.⁷⁶

Dengan demikian diketahui bahwa penyebab khiyar ‘aib adalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan (*ma’qud alaih*) karena kurangnya nilai atau tidak sesuai dengan maksud dan orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya ketika melakukan akad.

b) ‘Aib mengharuskan khiyar

Ulama hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ‘aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya yang merusak objek jual beli.

⁷⁶ Hasbiyallah, *Fikih*,....., h.32

Menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang yang dimaksud.⁷⁷

c) Syarat tetapnya khiyar

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, untuk mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya cacat harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- (1) Barang atau benda yang seharusnya mulus atau terlepas dari cacat ternyata memiliki cacat
- (2) Karena sulitnya menghilangkan cacat tersebut. Jika menghilangkan cacat tersebut tidak mengalami kesulitan maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Seperti membeli pakaian yang terkena najis.
- (3) Cacat tersebut berada di tangan penjual yang berarti cacat barang tersebut bukan diakibatkan oleh pembeli
- (4) Cacat tersebut tidak hilang sebelum terjadinya pembatalan akad
- (5) Penjual mensyaratkan bahwa barang yang dijualnya tersebut bebas cacat.

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan mengambil harganya atau tetap menahan

⁷⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,.....,h.67

barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya dan penjual memberikan ganti rugi cacatnya maka itu diperbolehkan.

d) Waktu khiyar 'aib

Khiyar 'aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Dalam mengembalikan barang yang cacat sebaiknya dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan karena ketika barang yang dibeli sudah dipakai dalam waktu lama maka khiyar 'aib tidak berlaku (batal). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyaratkan secara langsung.

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahui cacatnya, yakni secara langsung menurut adat dan tidak boleh ditangguhkan.⁷⁸ Tetapi, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Apabila mengakhir-akhirkan pengembalian barang yang cacat maka tidak berlaku lagi khiyarnya.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fikih Muamalah*,....., h.100

6. Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana salah satu pihak mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁷⁹

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

a. Hak penjual dan pembeli

- 1) Hak dari penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- 2) Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁰

b. Kewajiban Penjual dan pembeli

1) Kewajiban penjual

Kewajiban penjual dalam jual beli adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli

2) Kewajiban pembeli

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga

⁷⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h.79

⁸⁰ Baschan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.41

barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya tanpa pembayaran harga. Menurut abdulkadir muhammad, kewajiban pokok pembeli adalah menerima barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian di mana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁸¹

B. Tinjauan Pustaka

Banyak literature yang membahas tentang jual beli baik berupa skripsi maupun jurnal yang hampir sama dengan penelitian ini, namun tentunya ada perbedaan dalam objek serta tempat yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian. Maka diperlukan beberapa referensi yang digunakan sebagai bentuk penguat untuk penelitian ini. Adapun referensi tersebut antara lain:

1. Jurnal Rizky Febrina Purnamasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013), yang berjudul: Tanggungjawab Penjual Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru dalam hal adanya Cacat Tersembunyi. Jurnal ini mengemukakan bahwa tanggung jawab yang dapat diberikan oleh penjual adalah apabila ada cacat tersembunyi dan tanggung jawab tersebut hanya sebatas penggantian suku cadang atau kerusakan yang sejenis bukan mengganti dengan mengembalikan sepenuhnya sepeda motor ataupun pengembalian harga pembelian secara penuh.⁸²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Rizky Febrina Purnamasari adalah pada tanggung jawabnya. Jika dalam penelitian

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Abadi, 2014), h.257

⁸² <https://media.neliti.com/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

Rizky Febrina Purnamasari dealer akan tetap bertanggung jawab sesuai dengan waktu garansi yang terdapat dalam surat perjanjian jual beli, karena cacat tersembunyi tidak diketahui oleh dealer ketika menjual sepeda motor tersebut sedangkan dalam penelitian ini agen meminta tanggung jawab sepenuhnya kepada produsen padahal ketika genting cacat sebelum diangkut ke mobil kuli menggantinya dengan genting yang lain.

2. Skripsi Ahmad Syarifudin Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004) yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Wewenang Makelar dalam Jual Beli Genting*". Skripsi ini mendeskripsikan bahwa wewenang makelar genting merupakan bagian dari cara untuk memperlancar jual beli genting. dimana wewenang tersebut diberikan oleh pemilik genting kepada makelar sebagai bentuk kerja sama demi lancarnya transaksi antara konsumen dan produsen.⁸³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Syarifudin adalah jika dalam penelitian Ahmad Syarifudin makelar hanya sebagai perantara antara produsen dan konsumen tanpa menanggung resiko sedangkan dalam penelitian ini agen bukan hanya sebagai perantara melainkan agen juga melakukan akad (kesepakatan) langsung dengan produsen.

3. Skripsi Ahmad Saefudin Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang (2015) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli*

⁸³ <https://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

Batu Bata Merah. Skripsi ini mengemukakan bahwa dalam usaha pembuatan batu bata merah dari tahun ke tahun harganya mengalami perkembangan, hal tersebut yang menyebabkan pengusaha batu bata merah mendapat penghasilan yang lebih dari cukup.⁸⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Saefudin adalah pada tanggung jawabnya. Jika dalam penelitian Ahmad Saefudin pengusaha batu bata merah tidak menghiraukan keluhan dari konsumen apabila konsumen meminta tanggungjawab karena terjadi cacat pada barang yang sampai di tempat konsumen dan konsumen telah membayar batu bata merah ketika terjadi kesepakatan di awal akad sedangkan dalam penelitian ini agen meminta tanggung jawab secara paksa kepada produsen karena agen membayar ketika genting sudah dibawa oleh agen 2-3 hari dan akan langsung dipotong dengan total genting yang pecah ketika sampai di tempat tujuan padahal agen membeli dengan perhitungan bersih di tolong.

4. Skripsi Anni Amilul Kasanah Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo (2016) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektek Jual Beli Genting*. Skripsi ini mengemukakan bahwa praktek jual beli genting merupakan hal yang sudah biasa karena banyak masyarakat yang memproduksi genting. Apabila ada suatu kendala atau permasalahan maka pihak penjual sudah bisa untuk mengatasinya yaitu dengan

⁸⁴ <https://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

bermusyawarah dan mengambil jalan tengahnya supaya tidak terjadi pertengkaran.⁸⁵

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Anni Amilul Kasanah adalah penyelesaian permasalahan. Jika dalam penelitian Anni Amilul Kasanah penjual bermusyawarah terlebih dahulu dengan pembeli apabila ada permasalahan mengenai kualitas genting sedangkan dalam penelitian ini agen langsung memotong pembayaran dengan jumlah genting yang pecah tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan produsen.

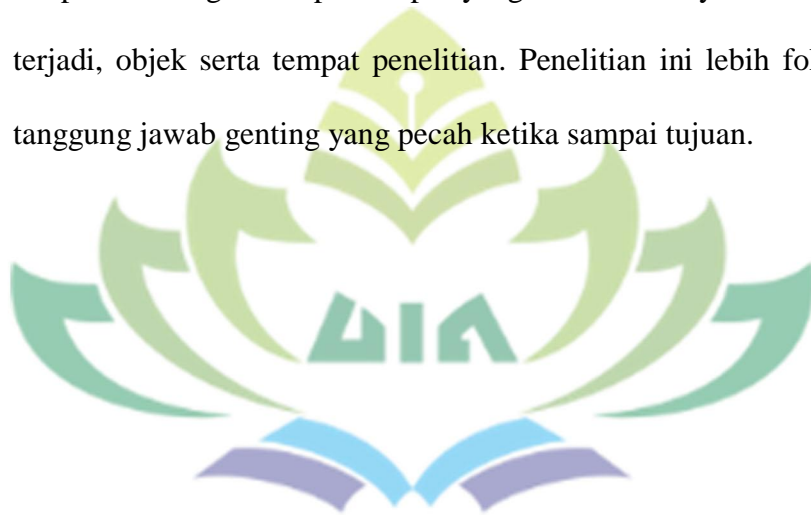
5. Skripsi Deni Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 yang berjudul *Tanggung Jawab Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa makelar mempunyai hubungan tidak tetap dengan penjual atau pembeli dalam melakukan perbuatannya, hubungan tidak tetap tersebut dapat diidentifikasi bahwa ketika makelar telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya serta mendapatkan haknya maka selesai sudah perhubungan hukum antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual. Namun dalam kasus yang terjadi makelar harus bertanggung jawab terhadap barang yang rusak karena penjual

⁸⁵ <https://etheses.iainponorogo.ac.id/> diakses pada tanggal 24 maret 2020

tidak mau bertanggung jawab dan menganggap bahwa makelar sebagai penerima kuasa dari penjual yang bertanggung jawab.⁸⁶

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Deni Kurniawan adalah pada tanggung jawabnya. Jika dalam penelitian Deni Kurniawan makelar tetap bertanggung jawab apabila terdapat barang yang rusak sedangkan dalam penelitian ini agen meminta tanggung jawab sepenuhnya kepada produsen apabila ada genting yang pecah.

Dari beberapa penelitian di atas maka ada perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang ada di atas yaitu masalah yang terjadi, objek serta tempat penelitian. Penelitian ini lebih fokus kepada tanggung jawab genting yang pecah ketika sampai tujuan.



⁸⁶ <http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-ikhlas, 1995

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 2007

Hamid, Syamsul Rizal, *Hadis & Sunah Pilihan*, Depok: Kaysa Media, Kaysa Media, 2017

B. Buku

Afifah, Nur, *Bentuk-bentuk Muamalah dalam Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2011

Al-fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ash-shawi, Shalah, abdullah al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008

Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Perss, 2011

Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-syariah*, Jakarta: Kencana, 2014

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta : Andi, 2004
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Gemilang, 2018
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Moloeng, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Abadi, 2014
- Mustafa, Baschan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2016
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sa'diyah, Madmudatus, *Fiqh Muamalah II*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

- Sahroni, Oni, M, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Wijayanti, Wikan, *Membuat Genteng dan Batu Bata*, Tangerang Selatan: Tirtamedia, 2013

C. Jurnal dan Sumber lain

- Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam*, *Jurnal Islaminomic*, Vol.V No. 2, Agustus 2016, h.80 (On-line), tersedia di <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/>, (2 Juli 2020, 17:00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- Ghofur, Ruslan Abd, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol,2 No,2, Juli 2010, h. (On-line), tersedia di <http://ejournal.kopertais.or.id/>, (13 Maret 2020, 08:42), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- Ridawati, Mujiatun, *Konsep Khiyar dan Relevansinya dengan Garansi*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No.1, 2016, h.2 (On-line), tersedia di <http://ejournal.kopertais.or.id/>, (2 Juli 2020, 17:00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

D. Wawancara

- Ari Susanto, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020
- Kadiman, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Kariyo Wasito, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Karyani, Agen, Wawancara, 18 Maret 2020

Maria katinem, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Nur Setyo Budi, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Sukardi, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Sumanto, Agen, Wawancara, 18 Maret 2020

Wiro Suparto, Produsen, Wawancara, 18 Maret 2020

Yustinus Susanto, Produsen, wawancara, 18 maret 2020

E. Internet

<https://media.neliti.com/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

<https://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

<https://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 25 maret 2020

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/> diakses pada tanggal 24 maret 2020

<http://digilib.unila.ac.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2020

